

GERAKAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN BEBAS SAMPAH

Bintarsih Sekarningrum, Desi Yunita dan Yogi Suprayogi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

E-mail: bintarsih.sekarningrum@unpad.ac.id ; desi.yunita@unpad.ac.id ; yogi.suprayogi@unpad.ac.id

ABSTRAK

Model pengelolaan sampah yang selama ini dikembangkan pemerintah terbukti hanya memindahkan sampah dari wilayah pemukiman ketempat pembuangan akhir (TPA). Penanganan sampah haruslah dimulai dari sumbernya yaitu rumah tangga. Masyarakat perlu diajak untuk menangani dan mencari solusi terhadap permasalahan sampah di lingkungannya. Kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM), dilakukan untuk merubah *mindset*, merubah pola penanganan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat dan membentuk kelompok swadaya masyarakat untuk mengelola sampah, melalui penyuluhan, pelatihan dan praktek. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong munculnya komitmen untuk membentuk Bank Sampah di lingkungan tempat tinggal dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadi perubahan *mindset* masyarakat dalam melihat sampah, sehingga sampah tidak lagi dilihat sebagai suatu masalah, tetapi juga dapat menjadi berkah bagi masyarakat melalui sosialisasi yang efektif tentang 3R menuju gerakan 4R (*reduce, reuse, recycle dan replace*). Tim Penggerak PKK menjadi motor penggerak sekaligus agen dari perubahan sosial dalam mewujudkan Kawasan Bebas Sampah. Saran, perlu membangun Bank Sampah, melakukan sosialisasi yang intensif tentang sistem pengelolaan sampah dan adanya jejaring yang melibatkan pihak pemerintah dan swasta, sehingga sistem pengelolaan sampah secara mandiri dapat terus berjalan.

Kata Kunci : Gerakan Sosial, Pengelolaan Sampah, Bank Sampah, Kawasan Bebas Sampah

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Movement in Realizing Waste-Free Areas

ABSTRACT

The waste management model that has been developed by the government was proven only to move waste from residential areas to landfills. Waste management must be start from the household. Communities need to be included to deal with and find solutions to waste problems in their environment. Community Service Activities (CSA) are carried out to change the community mindset and change the pattern of waste management, to increase public awareness and form community self-help groups to manage waste, through training, counseling and practice. This activity is expected to encourage the emergence of a commitment to form a Waste Bank in the neighborhood and encourage the community to sort their waste. The results of the activity has shown that there is a change in the mindset of society in seeing waste, so that garbage is no longer seen as a problem, but can also be a blessing for society through effective socialization of 3R (reduce, reuse and recycle) towards the 4R movement (reduce, reuse, recycle and replace). The PKK organization is the driving force and act as the agent of social change in realizing a Waste-Free Zone. Suggestions, need to build a Waste Bank, conduct intensive socialization of the waste management system and the existence of networks involving government and private parties, to realize the sustainable of the independent waste management system.

Key words: Social Movement, Waste Management, Waste Bank, Waste-Free Areas

PENDAHULUAN

Sampah di Indonesia sudah menjadi masalah serius dan mengkhawatirkan, karenanya perlu ditangani dari sumbernya yaitu masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting, karena masyarakat dapat menjadi agen sosial di tingkat komunitas. Beberapa upaya untuk mengurangi sampah telah banyak dilakukan, diantaranya melalui program Bank sampah yang di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2011. Bank Sampah telah berhasil mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal tersebut terlihat dari jumlah Bank Sampah yang terus bertambah setiap tahunnya. Namun keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, sehingga meskipun dinilai efektif dalam mengatasi masalah sampah namun masih rendahnya partisipasi masyarakat menjadikan program ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal.

Yayasan Unilever Indonesia (2013) memberikan pengertian Bank sampah sebagai suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar, sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Bank Sampah merupakan suatu skema pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai ekonomis dengan mendorong partisipasi masyarakat secara luas di tiap satuan pemukiman. Adanya insentif uang dari upaya memilih dan memilah sampah bernilai ekonomis diharapkan dapat mendorong meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pengembangan Bank Sampah.

Bank sampah merupakan tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, selanjutnya disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengumpul sampah. Bank sampah dikelola oleh sukarelawan yang menggunakan

sistem perbankan, sedangkan untuk penyetornya adalah warga sekitar dengan menyediakan buku tabungan seperti halnya menabung di bank. Program bank sampah menerapkan konsep penanganan sampah 3R (*reduce, reuse dan recycle*), namun tampaknya konsep ini juga berkembang menjadi gerakan 4R (*reduce, reuse, recycle dan replace*). Cakupan gerakan ini ditambah *replace*, agar sebisa mungkin mengganti penggunaan produk sekali pakai dengan produk yang dapat digunakan berulang kali yang bersifat ramah lingkungan. Dalam penanganan sampah tidak hanya memikirkan produk pengolahan, tetapi juga membentuk mentalitas masyarakat untuk bijak terhadap penanganan sampah dengan menggunakan produk ramah lingkungan.

Undang-undang No 18 Tahun 2008 pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, Kota Bandung saat ini mengembangkan upaya penanganan sampah melalui Program Kawasan Bebas Sampah. Kawasan Bebas Sampah (KBS) adalah suatu kawasan dengan sistem pengelolaan sampah dijalankan secara mandiri oleh masyarakat. Sebuah kawasan dapat disebut sebagai Kawasan Bebas Sampah (KBS) jika tidak ada sampah bertebaran di seluruh kawasan, baik di jalan, selokan/sungai, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), area pasar atau daerah komersil dan tempat lainnya.

Untuk mewujudkan Kawasan Bebas Sampah, perlu menjadikan permasalahan sampah sebagai masalah bersama dan kepedulian bersama melalui gerakan sosial di masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Bebas Sampah. Tahap yang harus dilakukan yaitu: (1) melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik; (2) mengolah sampah organik di kawasan dengan membuat lubang biopori atau dimanfaatkan untuk bahan pupuk kompos; (3) mengelola sampah anorganik bernilai jual dengan potensi yang ada di kawasan, salah satunya dengan membangun Bank Sampah; dan (4) membuang sampah residu ke TPS.

Permasalahan sampah harus diatasi melalui pelibatan semua pihak mulai dari pemilahan sampai pembuangan sampah residu. Untuk itu, perlu adanya suatu gerakan sosial masyarakat agar Kawasan Bebas Sampah dapat diwujudkan. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dengan melibatkan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai mitra kegiatan dalam upaya memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat tentang sistem pengelolaan sampah, agar masyarakat memiliki kesadaran sosial untuk merubah perilaku dalam memperlakukan dan mengolah sampah serta mewujudkan Kawasan Bebas Sampah melalui gerakan disiplin membuang, mengurangi dan mengolah sampah di lingkungan tempat tinggalnya.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan PPM tentang “Gerakan Sosial dalam Mewujudkan Kawasan Bebas Sampah (KBS)” dilaksanakan melalui 2 tahapan kegiatan. Pertama, kegiatan sosialisasi tentang sistem pengolahan sampah dalam bentuk penyuluhan, khususnya penyuluhan tentang gerakan mengolah dan mengurangi sampah dan kampanye penggunaan produk-produk ramah lingkungan. Kegiatan penyuluhan ini memberikan solusi secara sistematis dari aspek sosial, budaya, keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Dari aspek sosial dan budaya, kegiatan ini dapat membentuk perilaku dan budaya mengolah dan memilah sampah secara produktif, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat. Dari aspek keagamaan, mengolah sampah dengan baik merupakan perintah agama untuk senantiasa menjaga kebersihan karena kebersihan sebagian daripada iman. Selanjutnya pada aspek kehidupan bermasyarakat, dengan terbentuknya perilaku dan budaya dalam mewujudkan Kawasan Bebas Sampah, akan tercipta lingkungan kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat.

Kegiatan kedua, pelatihan dan praktek tentang pengolahan sampah serta merencanakan model pengolahan sampah yang dapat diterima oleh masyarakat dan pasar. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dalam membuat produk yang terbuat dari sampah anorganik. Kegiatan ini dapat memberikan solusi secara sistematis dari aspek sosial ekonomi dan kehidupan bermasyarakat. Melalui pengolahan sampah yang lebih kreatif dan inovatif, diharapkan dapat menjadi solusi penanganan sampah dan memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat setempat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui: (1) sosialisasi kepada warga masyarakat tentang kebersihan lingkungan, pengolahan sampah dan memilah sampah sebagai salah satu solusi penanganan sampah; (2) penyuluhan tentang pengolahan sampah kepada kader PKK dan masyarakat. Partisipasi mitra (PKK) dalam pelaksanaan program ini adalah membantu dalam hal penyuluhan dan pelatihan, termasuk memfasilitasi masyarakat dalam membahas ide-ide inovatif tentang pengolahan sampah serta melakukan pemantauan hasil pemilahan sampah oleh masyarakat.

Langkah evaluasi program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan PPM selesai dilaksanakan, yaitu : (1) memantau pengurangan volume sampah yang dibantu oleh mitra; (2) memantau tingkat perilaku masyarakat dalam memilah sampah; (3) memantau keberlanjutan pengolahan sampah menjadi produk-produk inovatif dan bermanfaat di masyarakat.

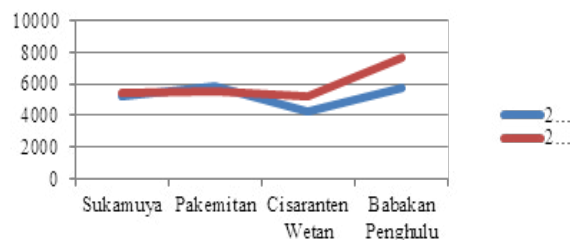
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Kecamatan Cinambo secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Bandung, dengan luas wilayah sebesar 3,68

Km² atau 2,20 persen dari total luas wilayah Kota Bandung. Kecamatan Cinambo merupakan kecamatan hasil pemekaran dari wilayah Kecamatan Ujung Berung dengan luas wilayah keseluruhan berdasarkan hasil pemekaran tersebut adalah 454,93 Ha. Kecamatan Cinambo terbagi dalam empat wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Pakemitan, Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Cisaranten Wetan, dan Kelurahan Babakan Penghulu. Dari empat wilayah pembagian ini, Kelurahan Babakan Penghulu adalah kelurahan dengan wilayah paling luas (mencakup 40 % wilayah Kecamatan Cinambo).

Jumlah penduduk Kecamatan Cinambo sebanyak 21.040 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 10.330 jiwa dan perempuan sebanyak 10.013 jiwa. Pada tahun 2017, terdapat perubahan jumlah penduduk khususnya di Kelurahan Babakan Penghulu. Wilayah tersebut merupakan kelurahan dengan wilayah yang paling luas, sehingga masih memungkinkan terjadinya penambahan penduduk. Arus keluar masuk penduduk juga sangat dinamis.



Grafik 1. Perubahan Komposisi Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk terbesar adalah masyarakat dengan usia 30 hingga 39 tahun. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dalam kategori usia produktif. Pada bidang keagamaan, mayoritas penduduk beragama Islam yaitu sebanyak 23.221 jiwa, sementara Kristen protestan sebanyak 405 orang, Katolik sebanyak 176 orang, Hindu sebanyak 48 orang dan Budha sebanyak 32 orang. Pada bidang pendidikan, jumlah terbesar penduduk adalah berpendidikan SMA, sehingga tingkat pengetahuan masyarakat dapat dikategorikan baik.

Gerakan Pengelolaan Sampah

Dalam upaya mendorong kesadaran sosial masyarakat untuk mewujudkan Kawasan Bebas Sampah, perlu adanya pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan sampah yang benar. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan, pelatihan dan praktek sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sasaran dan sekaligus mitra dari kegiatan ini adalah para kader PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Kegiatan PPM diawali dengan melakukan pemetaan tentang permasalahan persampahan di kawasan. Adapun tahapan kegiatan pemetaan meliputi :

1. Pemetaan potensi, sosial dan masalah

Pada kegiatan ini perlu dirumuskan : masalah apa perlu dicarikan solusinya segera, sehingga kawasan bisa berubah dengan cepat ?; apa sasaran yang ingin dicapai pada akhir tahun 2018; petakan setiap alternatif solusi yang muncul; kegiatan apa yang harus dilakukan di kawasan dalam setiap alternatif solusi.

2. Pemetaan wilayah

Pemetaan wilayah diantaranya meliputi pemetaan tentang : fisik wilayah; jejaring sosial dan waktu kegiatan; proyeksi dampak dari program; pengetahuan rata-rata masyarakat tentang program; dan media yang sesuai untuk kampanye.

3. Pemetaan fisik sarana prasarana lingkungan

Kegiatan ini meliputi pemetaan tentang drainase air hujan, lokasi potensi banjir atau genangan; tempat sampah umum; TPS milik PD Kebersihan; lokasi Bank Sampah (pengolahan sampah anorganik); lokasi taman yang ada; lokasi potensi untuk dibangunnya taman dan lorong hijau, pojok hijau atau *eduwall* (area dinding publik); fasum/fasos; peralatan persampahan; jalan; aktivitas pengelolaan sampah; jumlah timbulan sampah dan selokan/sungai.

4. Informasi sosial

Perlu dikumpulkan beberapa informasi sosial yang akan mendukung dalam pengelolaan sampah di kawasan, diantaranya informasi tentang demografi; jumlah penduduk laki laki dan perempuan; usia rata-rata; tingkat pendidikan rata-rata; jumlah Kepala Keluarga (KK); aktivitas sehari-hari; jadwal waktu kegiatan di lapangan; jaringan sosial masyarakat; peran tokoh masyarakat.

Kegiatan pemetaan dilaksanakan bersama para kader PKK yang diharapkan nantinya menjadi penggerak untuk melakukan gerakan sosial dimana sistem pengelolaan sampahnya dijalankan secara mandiri oleh masyarakat.

Tahap selanjutnya adalah membentuk kelompok swadaya masyarakat baik di tingkat RW maupun di tingkat kelurahan yang bertanggung jawab dalam mengelola sampah di kawasan. Tugas yang harus dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat adalah sosialisasi awal tentang sistem pengelolaan sampah ke masyarakat dan mengawasi peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, dan praktek, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem pengelolaan sampah, sehingga *mindset* masyarakat dapat berubah dalam memandang sampah secara positif serta mampu mewujudkan Kawasan Bebas Sampah melalui gerakan disiplin membuang, mengurangi dan mengolah sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Perubahan *mindset* sangat penting, karena diyakini dapat merubah pandangan masyarakat dalam mengelola

sampah. Sampah tidak dilihat sebagai masalah, tetapi sampah dilihat sebagai berkah yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Selain itu, kegiatan PPM juga diharapkan dapat merubah pola penanganan sampah dari pola penanganan sampah konvensional ke cara-cara baru salah satunya melalui Bank Sampah yang diyakini akan berdampak positif bagi masyarakat baik secara ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan. Merubah cara menangani sampah merupakan strategi kunci untuk mengatasi masalah sampah yang terjadi selama ini. Dengan merubah pola penanganan sampah, pola pikir masyarakat dalam pengelolaan sampah juga berubah. Perubahan pola penanganan sampah diharapkan akan mengurangi residu sampah secara signifikan ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

2 MERUBAH POLA PENANGANAN SAMPAH



Sumber : Bank Sampah Bersinar, 2018

Tujuan akhir kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan sosial dalam mengatasi masalah sampah. Kegiatan ini juga menjadi prakarsa dibentuknya kelembagaan Bank Sampah, sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan sampah yang diperoleh dari kegiatan pengabdian ini menjadi gerakan sosial di masyarakat. Pembentukan kelembagaan Bank Sampah diharapkan dapat mendorong seluruh masyarakat untuk terlibat menjadi nasabahnya, sehingga Kawasan Bebas Sampah dapat terwujud dan memberikan manfaat kepada masyarakat.



Sumber : Bank sampah Bersinar, 2018

Pembentukan Kawasan Bebas Sampah

Salah satu target pemerintah Kota Bandung dalam penanganan sampah adalah menciptakan kawasan bersih dengan metode pengelolaan sampah yang baik dan benar melalui program Kawasan Bebas Sampah. Kawasan Bebas Sampah (KBS) adalah kawasan dimana sistem pengelolaan sampahnya dijalankan secara mandiri oleh masyarakat. Sistem ini direncanakan, dikembangkan, dioperasikan, dikelola, dimodali dan dimiliki oleh kelompok warga dan didukung oleh pemerintah Kota Bandung. Adapun 5 prinsip kawasan bebas sampah yaitu, keterlibatan warga, kebijakan, efisien, pelestarian lingkungan, dan keterpaduan.

Sebuah Kawasan disebut sebagai Kawasan Bebas Sampah jika tidak ada sampah bertebaran di seluruh kawasan (jalan, selokan/sungai, TPS, area pasar atau komersil dan lainnya). Untuk mewujudkan KBS, sampah perlu dikelola agar sampah berkurang dari sumbernya (UU NO.18 Tahun 2008). Adapun Kriteria dalam KBS adalah : terlihat bersih, mampu mengelola sampah organik, mampu mengelola sampah anorganik, pengangkutan residu ke TPS, dan jumlah sampah dari rumah berkurang. Adapun pihak-pihak yang dapat berkontribusi dalam kawasan bebas sampah adalah keluarga, individu, RT, RW, Kelurahan, petugas pengumpul sampah, PD. Kebersihan, Pemerintah Kota Bandung dan pihak Swasta.

Tahapan pembentukan KBS meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan operasional dan tahap evaluasi dan pengembangan. Pada tahap persiapan, langkah pertama, membentuk pengurus KBS baik ditingkat Rukun Warga (RW) maupun kelurahan yang akan bertugas melakukan pemetaan dan analisis permasalahan persampahan di kawasan. Langkah kedua, membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang bertanggung jawab mengelola sampah di kawasan. Langkah ketiga, pengurus KBS dan KSM melakukan sosialisasi awal tentang sistem pengelolaan sampah ke masyarakat dan membangun jaringan ke berbagai pihak baik pemerintah/swasta untuk memenuhi biaya program KBS. Langkah keempat, pengurus KBS dan KSM membuat MoU dengan PD. Kebersihan tentang komitmen jadwal pengangkutan dan mekanisme pengangkutan sampah serta membuat peraturan pengelolaan sampah.

Pada tahap pelaksanaan operasional, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh KSM, yaitu : mengelola sampah RW di kawasan; mengawasi peran serta masyarakat dalam pemilahan sampah dan mengumpulkan retribusi; RW dan kelurahan berperan sebagai pengawas KSM; pengurus KBS dan KSM melakukan penegakan peraturan pada masyarakat berupa penghargaan dan sanksi. Selanjutnya beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada tahap evaluasi dan pengembangan yaitu pengurus KBS dan KSM melakukan evaluasi mekanisme sistem pengelolaan sampah KBS secara berkala melalui penentuan level dan pengurus KBS dan KSM berusaha mengembangkan kinerja hingga kawasan mencapai level 3 pada tingkatan Kawasan Bebas Sampah

Tabel 1. Tingkatan Kawasan Bebas Sampah

Kriteria	Level - 0	Level - 1	Level - 2	Level - 3
Terlihat bersih			√	√
M a m p u m e n g e l o l a sampah organik		√	√	√
M a m p u m e n g e l o l a s a m p a h anorganik			√	√
Pengangkutan residu ke TPS		√	√	√
J u m l a h sampah dari rumah tangga berkurang				√

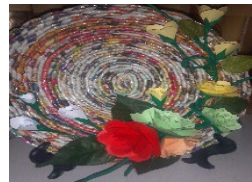
Keterlibatan semua pihak dalam sistem pengelolaan sampah sangat penting, karena permasalahan sampah bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi adanya sinergi dan kerjasama antara berbagai pihak, diharapkan Kawasan Bebas Sampah akan dapat diwujudkan. Apabila partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi gerakan sosial, maka pengurangan sampah menjadi lebih efektif. Tidak ada lagi anggapan bahwa sampah hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi kini masyarakat harus bertanggung terhadap sampah yang diproduksi. Walaupun program KBS ini merupakan program pemerintah, namun dengan paradigma baru ini masyarakat terlibat langsung dalam pengelolaan dan penanganannya. Melalui dukungan dari semua pihak, sebuah kawasan dapat menjadi Kawasan Bebas Sampah.

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kegiatan pengabdian pada Masyarakat (PPM) melalui pemberian keterampilan kepada masyarakat tentang pengolahan sampah anorganik, dapat menjadi bekal bagi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi dari sampah. Pelatihan ini dilakukan dengan mengolah sampah anorganik khususnya sampah plastik dan sampah kertas menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diterima oleh pasar. Kegiatan ini penting, selain dapat

meningkatkan kreativitas masyarakat dalam mengelola sampah anorganik, juga dapat melestarikan lingkungan. Memanfaatkan kertas dan botol plastik menjadi barang yang bernilai ekonomi merupakan peluang bisnis bagi ibu-ibu rumah tangga atau pengurus KBS (RW/kelurahan) yang memberikan nilai tambah. Sebagai contoh, botol plastik bekas dapat dibuat menjadi bunga, souvenir, membuat pajangan kristal dan lainnya, sedangkan kertas dapat dibuat menjadi bingkai foto, tepat tisu, tempat sampah, keranjang dan lainnya.

Praktek membuat kerajinan dari kertas dan botol bekas merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan agar sampah kertas bisa dimanfaatkan. Pada umumnya sampah kertas koran hanya dimanfaatkan sebagai pembungkus, namun apabila dikelola dengan baik, kertas koran dapat menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Keunikan kertas koran terdapat pada jenis kertasnya dan lebar kertasnya, serta kertas koran mudah untuk dilipat. Oleh karena itu membuat kerajinan dari kertas koran dapat dikerjakan secara individu maupun kelompok.



Dokumentasi : Tim PKM Tahun 2018

Berdasarkan hasil praktek kegiatan PPM yang sudah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa peserta pelatihan memiliki antusias dan merasakan manfaat dari kegiatan pelatihan keterampilan. Pelatihan ini selanjutnya akan dikembangkan di wilayah masing-masing agar sampah anorganik diolah, dikembangkan dan dipasarkan, sehingga menjadi peluang tambahan pemasukan bagi keluarga melalui usaha memanfaatkan sampah. Tumbuhnya kesadaran sosial masyarakat dalam melihat sampah sebagai peluang, diharapkan dapat meminimalisir sampah yang terbuang di lingkungan, sehingga Kawasan Bebas Sampah dapat diwujudkan.

Macionis (1999, dalam Sukmana, 2016:4) menyatakan bahwa *social movement* adalah aktivitas yang diorganisasikan bertujuan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial. Selanjutnya Spencer (dalam Sukmana, 2016:4), *social movement* adalah upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru. Mengacu pada pendapat Macionis dan Spencer, aktivitas yang dilakukan oleh para kader PKK

dalam mengolah sampah secara mandiri dan melakukan perubahan terhadap cara berpikir masyarakat tentang sampah, merupakan sebuah gerakan sosial untuk mengurangi sampah yang terbuang ke TPA dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, sehingga diharapkan terjadi perubahan yang diharapkan di lingkungannya berupa Kawasan Bebas Sampah. Gerakan sosial ini akan terus dilakukan di wilayah kawasan, sehingga upaya pengelolaan sampah mulai dari pemilahan sampah organik, anorganik, membangun Bank Sampah dan membuang sampah residu ke TPS dapat terus dipraktekkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat individu, keluarga, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, petugas pengumpul sampah, PD Kebersihan, Pemerintah Kota Bandung dan pihak swasta.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pelatihan, penyuluhan dan praktek tentang sistem pengelolaan sampah terhadap para kader PKK, dapat disimpulkan sebagai berikut: Gerakan PKK dalam mewujudkan Kawasan Bebas Sampah telah diterapkan di empat wilayah percontohan dengan menetapkan sistem pengolahan sampah menggunakan metode dan cara yang paling tepat menurut wilayahnya; Terjadi perubahan *mindset* masyarakat dalam melihat sampah, sehingga sampah tidak lagi dilihat sebagai suatu masalah tetapi juga dapat menjadi berkah bagi masyarakat melalui sosialisasi yang efektif tentang 3R menuju gerakan 4R (*reduce, reuse, recycle dan replace*); Tim Penggerak PKK menjadi motor penggerak sekaligus agen dari perubahan sosial yang perlu dilibatkan secara maksimal dalam merumuskan perencanaan dan strategi program pengolahan sampah dalam mewujudkan Kawasan Bebas Sampah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan Cinambo yang telah menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Universitas Padjadjaran yang telah memfasilitasi kegiatan PPM ini melalui dana Hibah Internal Unpad (HIU) tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- BPLH Kota Bandung. 2015. *Petunjuk Teknis Perwujudan Kawasan Bebas Sampah (KBS) Kota Bandung*. Bandung.
- Sekarningrum, Bintarsih, Sri Sulastri, Desi Yunita. 2014. *Gerakan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah di Bantaran Sungai Cikapundung Kota Bandung*. Bandung.
- Sekarningrum, Bintarsih. 2014. *Perilaku Masyarakat Membuang Sampah Di Bantaran Sungai Cikapundung Kota Bandung*. Bandung : Universitas Padjadjaran.
- 2015. *Gerakan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah di Bantaran Sungai Cikapundung Kota Bandung*. Bandung : Universitas Padjadjaran.
- 2016. *Model Pengelolaan Sampah Secara Partisipatif pada Masyarakat di Bantaran Sungai Cikapundung*. Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Situmorang, Abdul Wahid. 2013. *Gerakan Sosial : Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*. Jawa Timur : Intrans Publishing.
- Yayasan Unilever Indonesia. 2013. *Buku Panduan Sistem Bank Sampah*. Jakarta : Yayasan Unilever Indonesia.